

MODEL REFORMASI BIROKRASI BERBASIS DIGITAL MELALUI PENERAPAN APLIKASI SIDEMANG KANTOR KELURAHAN KOTA PALEMBANG

Derriansya Putra Jaya¹, Lies Nur Intan², Rita Junita³

¹⁾ Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Tamansiswa Palembang,

^{2),3)} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tamansiswa Palembang

Email : derriansya.putrajaya@gmail.com¹, liesnurintan2020@gmail.com²,
junitarita@ymail.com³

ABSTRACT

Bureaucratic reform is a crucial part of government implementation, particularly in public services. Digital transformation within the Indonesian government system will be comprehensive to support optimal public services. This government digital transformation is not simply the adoption of technology but a comprehensive change, encompassing the transformation and governance of government systems, from business processes to human resources and infrastructure utilization. The purpose of this research is to facilitate public access to information and services at the sub-district level, facilitate public monitoring of file progress from submission, processing, and receipt of certified TTE (Technical Document Transfer) from BSR, save time, and provide easy, fast, and efficient services at the sub-district level. This research also highlights the critical importance of bureaucratic reform in digital public services, particularly in the implementation of the Sidemang application for sub-districts in Palembang City. This digitalization of public services has been implemented in 107 sub-districts in Palembang City. Prior to the digitalization of public services, residents manually applied for certificates at the sub-district level by visiting the sub-district office with the required documents. This process takes longer, and information regarding services at sub-district and village levels is slower to reach the public. Following the implementation of the Sidemang App, the public can apply for certificates at sub-district and village levels easily and quickly through the Sidemang mobile (Android) and web-based applications. Face-to-face meetings with village operators are only necessary for verification by village officials once the files have been processed.

Keywords : *Bureaucratic Reform Model, Public Service, Digitalization, Sidemang*

ABSTRAK

Reformasi Birokrasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya, pelayanan Publik dimana transformasi digital dalam sistem pemerintahan Indonesia akan menyeluruh guna menunjang pelayanan publik yang optimal. Transformasi digital pemerintah ini bukan sekedar adopsi teknologi tapi merupakan perubahan yang menyeluruh, yang mencakup transformasi serta tata kelola sistem Pemerintahan dari mulai proses bisnis sumber daya manusia dan pemanfaatan infrastruktur. Tujuan penelitian ini adalah untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan di kelurahan, memudahkan masyarakat dalam memantau perkembangan berkas dari mulai diajukan, diproses, dan dibubuhkan TTE tersertifikasi dari BSR, menghemat waktu, memberi pelayanan di kelurahan yang mudah, cepat, dan efisien. Penelitian ini juga menjelaskan

sangat pentingnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik digital terutama dalam penerapan Aplikasi Sidemang kelurahan yang ada di Kota Palembang. Digitalisasi pelayanan publik tersebut telah diimplementasikan kepada masyarakat di 107 kelurahan yang ada di Kota Palembang. Sebelum adanya digitalisasi pelayanan publik masyarakat mengajukan pembuatan surat-surat keterangan di kelurahan secara manual dengan cara mendatangi langsung kantor kelurahan dengan membawa berkas-berkas persyaratan. Proses tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dan informasi terkait dengan pelayanan di kecamatan dan di kelurahan lebih lambat diterima oleh masyarakat. Sesudah adanya penerapan Aplikasi Sidemang masyarakat dapat mengajukan pembuatan surat-surat keterangan di kecamatan dan kelurahan melalui aplikasi Sidemang mobile (Android) dan berbasis web dengan mudah dan cepat. Proses tatap muka dengan operator kelurahan hanya dilakukan di proses verifikasi oleh petugas kelurahan saat berkas sudah selesai diproses.

Kata kunci : *Model Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik, Digitaliasi, Sidemang*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Industri 5.0 saat ini ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh empat faktor : 1) Meningkatnya volume data, daya komputasi, dan konektivitas; 2) Munculnya analisis bisnis, keterampilan, dan kecerdasan, 3) Terjadinya bentuk-bentuk baru interaksi antara manusia dan mesin dan 4) Peningkatan instruksi transfer digital ke dunia fisik, seperti robotika dan pencetakan tiga dimensi. Prinsip dasar industri 5.0 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas disepanjang rantai dan proses produksi untuk saling mengendalikan secara independen (Lifter dan Tschienner, 2013). Hermann, dkk, (2016) menambahkan, terdapat empat prinsip desain industri 5.0. Pertama, interkoneksi (koneksi), yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk saling terhubung dan berkomunikasi

melalui Internet of Things (IoT) atau Internet of People (IoP). Prinsip ini mensyaratkan kolaborasi, keamanan, dan standar. Kedua, transparansi informasi adalah kemampuan system informasi untuk menciptakan salinan virtual dari dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor, termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Ketiga, bantuan teknis yang meliputi : (a) Kemampuan system informasi untuk menciptakan salinan virtual dari dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor, termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar guna membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat ; (b) Kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau

tidak aman ; (c) Meliputi alat bantu visual dan fisik. Keempat, keputusan terdesentralisasi, yaitu kemampuan sistem fisik virtual untuk membuat keputusan sendiri dan melaksanakan tugas seefektif mungkin (Handayani & Muliastri, 2020).

Reformasi Birokrasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya pelayanan Publik dimana transformasi digital dalam sistem pemerintahan Indonesia akan menyeluruh guna menunjang pelayanan publik yang optimal. Transformasi digital pemerintah ini bukan sekedar adopsi teknologi tapi merupakan perubahan yang menyeluruh, yang mencakup transformasi serta tata kelola sistem Pemerintahan dari mulai proses bisnis sumber daya manusia dan pemanfaatan infrastruktur. Tata kelola Pemerintahan berupa transformasi proses bisnis, SDM, kelembagaan dan budaya. Kemudian transformasi digital pemerintah di bidang teknologi dengan pengembangan aplikasi dan infrastruktur serta transformasi data dan keamanan siber. Transformasi tersebut merupakan dukungan integrasi antar berbagai pihak, antara instansi pemerintah ke instansi lainnya (G2G), antara instansi pemerintah ke pegawainya (G2E), instansi pemerintah ke masyarakat (G2C), dan instansi pemerintah ke bisnis (G2B). Secara rinci,

layanan untuk integrasi G2G seperti persuratan, perencanaan, penganggaran, keuangan negara, dan lainnya. Sementara layanan dalam integrasi G2E mencakup kepegawaian, pensiun, kinerja, pengembangan kompetensi, dan lainnya. Kemudian, untuk layanan G2C adalah kependudukan sosial, kesehatan, pendidikan, SIM online, dan lainnya. Terakhir adalah layanan integrasi G2B yang merupakan perizinan, pengadaan, pekerjaan umum, bea dan cukai, dan layanan lainnya. (Teknowijoyo & Marpelina, 2021).

Latar belakang penelitian ini akan mengidentifikasi dan mendeskripsikan penerapan aplikasi yang merupakan model reformasi birokrasi di kantor Kelurahan Kota Palembang yang diberi nama Aplikasi Sidemang (Sistem Informasi Administrasi Online Masyarakat Palembang) sebuah sistem informasi smart Governance berbasis web dan mobile yang dibangun untuk melayani masyarakat Kota Palembang terkait administrasi (surat keterangan) di Kelurahan secara online yang dapat didownload melalui handphone android (*play store*) dan handphone iphone (*app store*).

B. KAJIAN PUSTAKA

Industri 5.0 telah memperkenalkan teknologi produksi massal yang fleksibel (Rakicka-Pustuŷka dkk.,2020). Lebih lanjut, mesin akan beroperasi secara mandiri atau terkoordinasi dengan manusia. Industri 5.0 merupakan pendekatan untuk mengendalikan proses produksi dengan menyinkronkan waktu melalui penyatuan dan penyesuaian produksi. Menurut Lionardo dkk. (2020); Neumann dkk. (2021), industri 5.0 dimanfaatkan dalam tiga faktor yang saling terkait, yaitu: 1) Digitalisasi dan interaksi ekonomi dengan teknik sederhana menuju jaringan ekonomi dengan teknik kompleks; 2) Digitalisasi produk dan layanan; dan 3) Model pasar baru.

Revolusi digital dan era disrupsi teknologi merupakan istilah lain untuk industri 5.0. Disebut revolusi digital karena maraknya penggunaan komputer dan otomatisasi pencatatan di segala bidang. Industri 5.0 disebut sebagai era disrupsi teknologi karena otomatisasi dan konektivitas di suatu bidang akan membuat dunia industri dan persaingan kerja menjadi non-linear. Salah satu ciri khas industri 5.0 adalah penerapan kecerdasan buatan (Tjandrawinata, 2016). Salah satu bentuk penerapannya adalah penggunaan robot untuk menggantikan tenaga kerja manusia

sehingga lebih murah, efektif, dan efisien. Revolusi Industri 5.0 diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi industri, pelanggan, karyawan, dan masyarakat pada umumnya, seperti peningkatan produktivitas manufaktur, kualitas dan keamanan, penciptaan lapangan kerja baru, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan (Siagian, 2023).

Tantangan administrasi publik menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat daerah. Itulah sebabnya tuntutan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan daerah selain syarat-syarat di atas adalah untuk memperoleh, mempermudah dan mendekatkan diri kepada pemerintah pusat sebagai pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan isu yang sangat krusial dan menarik untuk selalu diperbincangkan. Dimana dalam praktiknya masyarakat selalu berada pada posisi tawar yang tidak seimbang dengan pemerintah. Pemerintah sebagai pelaku utama birokrasi cenderung membuat regulasi yang berbelit-belit dan rumit.

Terdapat 4 (empat) kategori pelayanan publik, yaitu: Pelayanan administratif, seperti pemberian berbagai perizinan dan identitas penduduk, pelayanan infrastruktur, seperti jalan,

jaringan irigasi, transportasi dan lain-lain, pelayanan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, air minum, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, rasa aman dan lingkungan hidup yang bersih., Pelayanan pendapatan daerah, seperti pendapatan asli daerah (Thoha Miftah, 2008)

Terkait dengan penelitian ini, pelayanan publik yang dimaksud termasuk dalam kategori pelayanan administratif di mana para birokrat yang menjalankan dan mengoperasikan tanggung jawabnya tidak berfungsi secara ideal, bahkan tumbuh dalam mesin pemerintahan yang besar. Padahal, dalam konsep Max Weber, kehadiran birokrasi dimaksudkan untuk membatasi kewenangan penguasa yang berlebihan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa pandangan para pengamat, ilmuwan sosial dan praktisi mengenai birokrasi dalam kaitannya dengan pelayanan publik mengungkapkan keinginan yang ditulis oleh Osborne dan Gaebler, dalam bukunya *Reinventing Government*, yaitu sepuluh alternative model bagi birokrasi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang baik. Pertama; sebagai pembuat kebijakan, pemerintah hendaknya mampu berperan sebagai pemandu, bukan

bersikukuh menjadi pelaksana. Kedua; pemerintah sebagai milik masyarakat hendaknya memberdayakan masyarakat. Ketiga; pemerintah sebagai lembaga yang hidup dalam era persaingan hendaknya menyuntikkan semangat kompetitif ke dalam benak aparatur pemerintah dan organisasi pelayanan. Keempat ; unit pemerintah sebagai lembaga yang bertugas mewujudkan misi hendaknya lebih bebas berkreasi, tidak terbelenggu dengan aturan dan pedoman pelaksanaan yang kaku. Kelima ; sebagai “pabrik” yang berorientasi pada hasil, pemerintah hendaknya lebih mementingkan hasil yang ingin dicapai daripada terlalu terfokus pada input. Keenam; sebagai pelayan masyarakat, idealnya pemerintah lebih mementingkan pemenuhan kepuasan masyarakat daripada kepentingannya sendiri. Ketujuh; sebagai badan usaha pemerintah, harus cerdas dalam mencari peluang untuk memperoleh devisa negara. Kedelapan ; sebagai lembaga yang memiliki daya antisipatif pemerintah, harus mampu mencegah timbulnya masalah. Kesembilan; Sebagai pemegang kewenangan desentralisasi pemerintah, pemerintah hendaknya mengubah pola kerja hierarkis yang selama ini dianut menuju model kerja partisipatif dan kerja sama. Kesepuluh ; sebagai pihak yang berorientasi pasar, pemerintah hendaknya

berupaya mendorong perubahan melalui kendalanya atas mekanisme pasar. Goetsch dan David (Fandy Tjiptono, 2000)

Secara umum, pelayanan publik mutlak milik publik, artinya mereka berhak mendapatkannya karena sudah menjadi kewajiban birokrat untuk melayani publik. Namun, yang menjadi permasalahan adalah seberapa baik pelayanan publik itu dan memuaskan publik serta apa yang menjadi ukuran atau indikator kinerja pelayanan publik oleh organisasi publik. Permasalahan ini muncul ketika masing-masing pihak merasa belum memperoleh pelayanan yang memuaskan dan birokrat merasa telah melakukan dan memberikan pelayanan yang baik kepada publik. Terdapat dua hal yang berbeda, menilai perlunya indikator kinerja untuk menilai kualitas pelayanan publik dan organisasi publik harus memiliki tujuan dan misi organisasi. Indikator kinerja, tujuan dan misi organisasi diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi publik. Indikator tersebut adalah produktivitas, secara umum dipahami sebagai rasio antara masukan dan keluaran oleh suatu organisasi publik maupun swasta. Kualitas pelayanan. (Gali Artha Cendana : 2022)

Penyediaan pelayanan publik, khususnya layanan administrasi, harapan yang ingin dicapai dengan terjadinya pembangunan daerah adalah masyarakat

semakin dekat dengan pusat pemerintahan dan mendapatkan layanan yang "wajar" dari para birokrat dengan indikator tepat waktu, biaya, ringan, transparan, akuntabilitas, dan empati kepada publik. Dengan demikian, layanan public merupakan bentuk layanan yang diperoleh masyarakat dari pemerintah, dimana mereka mendapatkannya sesuai dengan ketentuan yang mengatur keberadaan layanan tersebut. Kemajuan teknologi memungkinkan otomatisasi di hampir semua bidang. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologis akan mengubah pola kehidupan dan interaksi manusia secara fundamental (Jipp et al., 2008; Lionardo dan Nasirin, 2020b). Industri 5.0 sebagai fase revolusi teknologi mengubah cara aktivitas manusia dalam skala, cakupan, kompleksitas, dan transformasi dari pengalaman hidup sebelumnya. Manusia bahkan akan hidup dalam ketidakpastian global. Oleh karena itu manusia harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan yang berubah sangat cepat. Setiap Negara harus merespons perubahan ini secara terpadu dan komprehensif. Respons ini melibatkan keterlibatan semua pemangku kepentingan politik global, dari sektor publik, swasta, akademis, hingga masyarakat sipil sehingga tantangan Industri 5.0 dapat dikelola menjadi peluang. Wolter

mengidentifikasi tantangan industri 5.0 berikut: 1)Masalah keamanan teknologi informasi, 2)Keandalan dan stabilitas mesin produksi, 3)Kurangnya keterampilan yang memadai, 4)Keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan, 5)Hilangnya banyak pekerjaan karena beralih ke otomatisasi (Sung, 2017). Pada dasarnya, kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari permasalahan publik dan pemerintahan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan di kantor kelurahan dan memudahkan masyarakat dalam memantau perkembangan berkas dari mulai diajukan, diproses, dan dibubuhkan tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi, menghemat waktu, memberi pelayanan di kelurahan yang mudah, cepat, dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara cermat dan teliti, agar hasil yang diperoleh akurat. Kegiatan penelitian dilakukan dengan cermat dalam menentukan jenis data, sumber data, cara pengumpulan data, tujuan penelitian, dan teknik analisis data. Pendekatan deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk pengukuran secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu dalam

mengembangkan konsep dan mengumpulkan fakta yang ada di lapangan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Design Reformasi birokrasi melalui digitalisasi merupakan bagian dari tantangan dan peluang Industri 5.0 mendorong inovasi dan kreasi suatu daerah. Pemerintah perlu mengkaji ulang relevansi kemampuan daerah dalam merespons perubahan, tantangan, dan peluang di era industri 5.0 dengan tetap memperhatikan aspek manusia (humaniora) (Lodgaard dan Dransfeld, 2020; Nasirin dan Lionardo, 2020). Menanggapi tantangan industri 5.0, Bukit (2014), menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah perlu menyiapkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki karakteristik sebagai berikut: 1)Berorientasi pada kinerja individu dengan penguasaan kompetensi digital; 2)Justifikasi khusus pada kebutuhan riil di lapangan; 3)Fokus pada aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif;4)Tolak ukur keberhasilan tidak terbatas pada sekolah; 5)Kepekaan terhadap perkembangan dunia kerja; 6)Memerlukan sarana danprasarana yang memadai; dan 7)Adanya dukungan masyarakat.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa unsure kebaharuan (Novelty) dalam penelitian ini dapat digambarkan dari cara

proses pengajuan berkas bisa dilakukan dimana saja melalui website maupun aplikasi mobile pada android/iOS, Penggunaan Tanda tangan elektronik (TTE) tersertifikasi oleh BSR E untuk Lurah, Masyarakat dapat melacak berkas yang diajukan, Waktu pemrosesan berkas terukur, Manajemen berkas secara elektronik sehingga lebih mudah dalam pencarian, Persyaratan yang sudah pernah diajukan pemohon tidak perlu verifikasi lagi karena telah tersimpan di server sedangkan inovasi dalam penelitian ini yaitu ; 1)Melayani secara online melalui web dan aplikasi mobile pada android/iOS, 2)Input layanan dari masyarakat akan masuk ke inbox operator, 3)Operator kecamatan/ kelurahan bertugas menyetujui atau menolak setiap berkas dari masyarakat melalui handphone atau computer, 4)Setelah disetujui oleh Kasi, Seklur maka Lurah akan menandatangani berkas masuk secara TTE pada aplikasi, Operator melakukan validasi berkas,

Muncul notifikasi pada masyarakat jika berkas selesai dan berkas bisa didownload . Adapun jenis pelayanan publik yang dapat dilakukan secara digital di Kantor Kelurahan adalah pembuatan : 1)Surat Keterangan Domisili, 2)Surat Keterangan Domisili Sementara, 3)Surat Keterangan Berobat, 4)Surat keterangan umum, 5)Surat Keterangan Keluarga Kurang Mampu, 6)Surat Keterangan

Belum Menikah, 7)Surat Keterangan Janda, 8)Surat Keterangan Duda, 9)Surat Keterangan Usaha, 10)Surat Keterangan Domisili Sementara WNA, 11)Surat Keterangan Kematian, 12)Surat Keterangan Beda Nama, 13)Surat Keterangan penguburan dan pengabuan, 14)Surat keterangan pengurangan PBB, 15)Surat keterangan kematian suami/istri, 16)Surat keterangan Belum Memiliki Rumah , 17)Formulir pengantar nikah (muslim), 18)Formulir pengantar nikah (non muslim)

Pengembangan kompetensi Digital harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem untuk menjawab tantangan industri 5.0. Belle et al. (2017) menawarkan suatu model yang disebut Bioecological Model of Human Development. Elemen tersebut harus terlibat dalam sistem pembelajaran satuan pendidikan, peserta didik dan pendidik serta tenaga kependidikan sesuai dengan perannya masing-masing (Asch et al., 2020; Nasirin et al., 2020). Aparatur Sipil Negara, yang disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa tugas dan fungsi pegawai negeri sipil adalah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. Berkaitan dengan Revolusi Industri 5.0, sebagai pelayanan publik, tentunya ASN dituntut untuk bekerja secara optimal.

Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak lagi berpikir rutin, melainkan berpikir *thinking out of the box*. Jika perlu, berpikirlah di luar kotak untuk memiliki layanan mental, wawasan dan pengetahuan juga harus bersifat global, tidak sempit dan tidak terbuka serta alergi terhadap pendapat orang lain. Aparatur Sipil Negara (ASN) juga statis dan dinamis serta memiliki kompetensi digital.

Berdasarkan data tersebut, kita mengetahui bahwa industri 5.0 membawa banyak perubahan pada dampak lingkungan kehidupan manusia dan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan bermanfaat (Adeel et al., 2017 ; Nasirin, 2020).

E. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sangat pentingnya reformasi birokrasi dalam digitalisasi pelayanan publik terutama dalam penerapan Aplikasi Sidemang kelurahan Kota Palembang. Hal tersebut dapat didiskripsikan melalui pelayanan publik berbasis digital kepada masyarakat di 107 kelurahan yang ada di Kota Palembang. Sebelum adanya digitalisasi pelayanan publik masyarakat mengajukan pembuatan surat-surat keterangan di kecamatan dan kelurahan secara manual, yaitu dengan mendatangi langsung kantor kecamatan

dan kelurahan dengan membawa berkas-berkas persyaratan.

Proses tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama dan informasi terkait dengan pelayanan di kecamatan dan di kelurahan lebih lambat diterima oleh masyarakat. Sesudah adanya penerapan Aplikasi Sidemang masyarakat dapat mengajukan pembuatan surat-surat keterangan di kecamatan dan kelurahan melalui aplikasi Sidemang mobile (Android) dan web dengan mudah dan cepat. Proses tatap muka dengan operator kecamatan dan kelurahan hanya dilakukan di proses verifikasi oleh petugas kecamatan dan kelurahan saat berkas sudah selesai diproses.

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah saat ini harus melakukan reformasi birokrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari kompetensi yang dimilikinya terutama kemampuan digitalisasi dan technology dalam penerapan pelayanan publik, peningkatan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kemampuan kepemimpinan yang kuat, pengembangan inovasi pelayanan publik, dan kreativitas yang tinggi. Kepemimpinan dan aparatur sipil Negara (ASN) dalam pemerintahan daerah harus memiliki jiwa kepemimpinan transformatif, dimana pemimpin suatu daerah mampu menerjemahkan dan

mengubah kondisi saat ini ke kondisi saat ini era Industri 5.0.

Kesiapan suatu daerah dalam mendukung revolusi Industri 5.0 meliputi kesiapan struktur organisasi, kesiapan infrastruktur teknologi dan kesiapan sumber daya manusia dalam menguasai digitalisasi. Strategi pemerintah daerah dalam mempersiapkan revolusi Industri antara lain dengan mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan dalam memahami penggunaan teknologi IoT atau melalui pelayanan publik yang berbasis digitalisasi, mengintegrasikan kemampuan internet dan manusia dengan mensosialisasikan literasi Digital kepada masyarakat luas dan pengguna aplikasi Sidemang Kantor Kelurahan Kota Palembang, sehingga aplikasi yang disiapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mudah, cepat dan bermanfaat

DAFTAR PUSTAKA

- Adeel, Muhammad, Xiaoming Song, Yuan Wang, Dennis Francis, dan Yuesuo Yang. (2017). Dampak lingkungan estrogen terhadap kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan: tinjauan kritis. *Environment International* 99: 107-119.
- Asch, David, A Steven Joffe, Barbara E Bierer, Sarah M Greene, Tracy A Lieu, Jodyn E Platt, Danielle Whicher, Mahnoor Ahmed dan Richard Platt. (2020). Memikirkan kembali pengawasan etika di era sistem kesehatan pembelajaran. Dalam Memikirkan kembali pengawasan etika di era system kesehatan pembelajaran, Kesehatan, 100462: Elsevier.
- Artha Cendana, Gali. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Jombang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang. Vol.10. No. 4
- Bartkowiak, Piotr dan Maciej Koszel 2017. Bentuk hubungan antar unit pemerintahan daerah di Polandia wilayah metropolitan. *Procedia Engineering* 182: 76-82.
- Belle, Morgane, David Godefroy, Gérard Couly, Samuel A Malone, Francis Collier, Paolo Giacobini, dan Alain Chédotal. (2017). Visualisasi dan analisis tiga dimensi perkembangan awal manusia. *Cell* 169: 161-173. e112.
- Handayani, N. N. L., & Muliastri, N. K. E. (2020). Pembelajaran Era Disruptif Menuju Era Society 5.0 (Telaah Perspektif Pendidikan Dasar). Prosodong Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya, 0, 1-14. <https://prosiding.iahntp.ac.id>
- Jipp, Meike, Achim Wagner, dan Essameddin Badreddin. (2008). Perancangan system interaksi manusia-teknologi yang andal berbasis kemampuan individu. *Prosiding IFAC Volume* 41: 14779-14784.

- Latunreng, Wahyuddin, dan Chairun Nasirin. (2019). Keunggulan kompetitif : Menggali peran kemitraan dengan pemasok, hubungan pelanggan, dan berbagi informasi sebagai anteseden. *Jurnal Manajemen Rantai Pasok* 8: 404-411.
- Lionardo, Andries dan Chairun Nasirin. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan Tanda Tangan Berbasis Digital terhadap Kualitas Layanan Tanda Tangan Berbasis Digital Kinerja Pemerintah Daerah. *Webologi* 17.
- Lodgaard, Eirindan Sebastian Dransfeld. (2020). Aspek organisasi untuk integrasi manusia-mesin yang sukses Interaksi di era industri 5.0. *Procedia CIRP* 88: 218-222.
- Neumann, W. Patrick, Sven Winkelhaus, Eric H. Grosse, dan Christoph H. Glock. (2021). Industri 4.0 dan Faktor Manusia–Kerangka kerja sistem dan metodologi analisis untuk pengembangan yang sukses. *Jurnal Internasional Ekonomi Produksi* 233: 107992.
- Rakicka-Pustuŷka, Magdalena, Aleksandra M Miroŷczuk, Ewelina Celiŷska, Wojciech Biaŷas dan Waldemar Rymowicz. (2020). Peningkatan teknologi produksi erythritol– Simulasi proses dan analisis tekno-ekonomi. *Jurnal Produksi Bersih* 257:120533.
- Siagian, H. F. A. S. (2023). Mengenal Revolusi Industri 5.0. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknllahat/baca-artikel/16023/Mengenal->
- Sung, TK (2017). *Industri 5.0 : Perspektif Korea. Peramalan Teknologi dan Perubahan Sosial*. *Jurnal*, 1-6. Revolusi-Industri-50.html#:~:text=Revolusi Industri 5.0 lebih menitikberatkan,%2C berkelanjutan%2C dan meningkatkan kesejahteraan
- Thoha Miftah, (2008), *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta. Kencana

